

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini memuat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut mendasari penulis dalam melakukan penelitian baik sebagai acuan ataupun sebagai pembeda sehingga penelitian yang penulis lakukan terbebas dari unsur plagiasi. Berikut kumpulan penelitian terdahulu yang penulis gunakan:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ian Dwi Heruyanto pada tahun 2016 yang berjudul *“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Penanaman Modal dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta”*. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, serta variabel Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Penanaman Modal dalam Negeri sebagai variabel independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji signifikansi simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan berdasarkan uji signifikansi individual variabel variabel Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum dan Penanaman Modal dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel

Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umdatul Husna pada tahun 2015 yang berjudul *“Pengaruh PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota se Jawa Tengah”*. Penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel PDRB, inflasi dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji signifikansi simultan semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan uji koefisien determinasi sebesar 66,91%.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta pada tahun 2014 yang berjudul *“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”*. Penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini berdasar uji signifikansi simultan adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan berdasar uji signifikansi individual menunjukkan bahwa variabel produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap pad, variabel

jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap pad, dan variabel jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pad.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yani Kuntari yang berjudul *“Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar”*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk dan inflasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pdrb dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pad, dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pad.

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu yang berjudul *“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah total pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan pdrb. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan pdrb berpengaruh positif signifikan terhadap pad.

Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Yeni Kurniawati Gitaningtyas dan Taufik Kurrohman pada tahun 2014 yang

berjudul “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*”. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk dan investasi swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pdrb, jumlah penduduk dan investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

1	Ian Dwi Heruyanto (2016)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: PDRB, jumlah penduduk, DAU, PMDN Metode Analisis: Regresi Data Panel	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Uji signifikansi individual (t) = 1) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 2) Jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD 3) DAU berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 4) PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
2	Umdatul Husna (2015)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: PDRB, inflasi, dan pengeluaran pemerintah Metode analisis: Ordinary Least Squares	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Uji koefisien determinasi

		(OLS)	(R ²) = 66,91%
3	Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta (2014)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan Metode analisis: regresi linier berganda	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Uji koefisien determinasi (R²) = 86,9% Uji signifikansi individual (t) = 1) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 2) Jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD 3) Jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
4	Triani dan Yeni Kuntari (2010)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi Metode analisis: regresi linier berganda	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD determinasi Uji koefisien (R²) = 97,7% Uji signifikansi individual (t) = 1) PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD 2) Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 3) Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD
5	Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji	Variabel dependen: Pendaptan Asli Daerah (PAD) Variabel independen:	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh

	Rahayu (2005)	Total pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Metode analisis: Regresi linier berganda	signifikan terhadap PAD Uji koefisien determinasi (R^2) = 97,8% Uji signifikansi individual (t) = 1) Total pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 2) Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 3) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
6	Yeni Kurniawati Gitaningtyas dan Taufik Kurrohman (2014)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta Metode analisis: regresi linier berganda	Uji signifikansi simultan (F) = semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Uji signifikansi individual (t) = 1) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 2) Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD 3) Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ian Dwi Heruyanto. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Adapun perbedaan dengan

penelitian sebelumnya terdapat pada variabel pengeluaran pemerintah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada tahun periode dan objek penelitian. Tahun periode yang penulis gunakan adalah pada tahun 2010-2014. Objek penelitian yang penulis ambil juga berbeda, yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang menggunakan metode analisis linier berganda, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat bantu olah data statistik berupa E-Views seri 8.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah kepada organisasi semi-otonom dan *parastal* ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah (Said, 2008: 5). Sedangkan menurut Said sendiri, otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah kabupaten/provinsi kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UU (Said, 2008: 6).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU No.33 Tahun 2004). Dengan demikian, PAD adalah sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah.

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 Pasal 6 telah menguraikan, sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah

Islam telah mengajarkan bagaimana berkenegaraan yang baik. Pemerintah merupakan wakil dari masyarakat untuk mensejahterakan umat dalam skala yang besar, sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan ataupun peraturan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dari pemerintah tersebut selama tidak mendatangkan *madharat*. Dalam pandangan Islam, pajak ataupun retribusi, keduanya menjadi kewajiban dari masyarakat karena kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini telah difirmankan Allah dalam surat An-Nisâ' ayat 59 (Ar-Rifa'i, 1999: 1.557).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...¹

Berdasarkan ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisâ' ayat 59 yang memerintahkan agar manusia menaati Allah (yakni ikutilah kitab-Nya), dan taatlah kepada Rasul-Nya (yakni pegang teguhlah Sunahnya) dan ulil amri di antara kamu (yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Sebab tidak ada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Allah (Ar-Rifa'i, 1999: 1.558). Ulil Amri dalam konteks ini adalah pemerintah. Konsep dari ayat tersebut mendasari masyarakat suatu daerah untuk taat dan patuh terhadap segala kebijakan ataupun aturan dari pemerintah selama hal tersebut bertujuan baik dan tidak secara batil. Hal ini juga termasuk dalam hal mematuhi untuk membayar pajak, selama harta yang terkumpul dari pajak digunakan sebagaimana mestinya, yakni digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

¹ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu”.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto

2.2.2.1. Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Untuk menilai presentasi pertumbuhan ekonomi haruslah dihitung terlebih dahulu pendapatan nasional riil yaitu GDP yang dihitung berdasar harga yang berlaku dalam tahun dasar (Rianto, 2010: 38). Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur perekonomian di tingkat negara. Sedangkan untuk tingkat daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan,² yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Produk Domestik Regional Bruto berdasar pendekatan pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor);
- 3) Pendekatan terakhir yang sering digunakan adalah pendekatan produksi, yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

²[http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_\(PDRB\)_rev160615.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_(PDRB)_rev160615.pdf) diakses tanggal 30 juli 2016 jam 10.03 WIB

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* juga telah menyatakan akan pentingnya pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dalam Al-Qur'an Surat al-Jumu'ah Ayat 10, Allah SWT telah berfirman (Suwiknyo, 2010: 77):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.³

Penjelasan ayat terbut menurut Suwiknyo dalam bukunya dijelaskan bahwa salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara pemenuhan kehidupan akhirat dan dunia. Ayat tersebut memberikan keleluasaan dalam mencari penghidupan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah. Ayat tersebut memerintahkan untuk menjemput rezeki dengan penuh kesadaran untuk selalu mengingat Alla dalam hati dan pemenuhan kewajiban melakukan perniagaan semata (Suwiknyo, 2010: 77-78). Ayat tersebut menjelaskan tentang penumbuhan ekonomi masyarakat yang bisa dilakukan melalui perniagaan yang dilandasi atas dasar ketaatan dan selalu mengingat Allah SWT.

2.2.2.2. Hubungan PDRB dengan PAD

Peneliti menggunakan teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan, pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan

³ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

pemerintah yang semakin besar, begitu halnya dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 1993:173). Teori tersebut menjelaskan hubungan tentang pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan daerah melalui pajak juga akan meningkat walaupun tarif dari pajak tidak berubah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemungutan pajak yang terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang mampu membayar pajak.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dari Heruyanto (2016), Susanto (2014), Santosa dan Rahayu (2005), Sari (2013), Jaya dan Widanta (2014) mengenai pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

2.2.3. Jumlah Penduduk

2.2.3.1. Konsep Jumlah Penduduk

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2013, yang dimaksud dengan penduduk adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia, dan orang bukan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan penduduk tersebut

memungkinkan negara itu menambahkan produksi. Di samping itu pendidikan, latihan, pengalaman kerja dan ketrampilan penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan produktivitas bertambah. Dan ini selanjutnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya perlu diingat bahwa pengusaha merupakan bagian dari penduduk. Maka luasnya ekonomi suatu negara bergantung pada jumlah pengusaha dalam ekonomi (Sukirno, 2004: 430). Semakin banyak jumlah pengusaha dalam suatu daerah, maka akan semakin banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Sebagai pedoman hidup yang lengkap, Al-Qur'an juga telah menyinggung tentang karunia Allah SWT yang Ia turunkan kepada umat manusia. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah, maka meletakkan ketaqwaan kepada Allah merupakan suatu syarat utama bagi hadirnya *rezeki* Allah. Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-A'râf ayat 96 (Shihab, 2006 :5.181).

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ⁴

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah keimanan menjadikan seseorang selalu merasa aman dan optimis, dan ini mengantarnya hidup tenang dan berkonsentrasi dalam usahanya. Itu sebabnya keimanan kepada Allah selalu ditekankan dalam segala hal, termasuk dalam upaya memperoleh rezeki. Ini bukan anjuran menanti kedatangan rezeki tanpa usaha, tapi tujuannya adalah menanamkan rasa percaya diri,

⁴ Yang artinya “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

mengembangkan cinta kasih, serta ketenangan batin bila rezeki yang diharapkan belum berkunjung tiba (Shihab, 2006: 182).

Ketakwaan penduduk suatu negeri menjadikan mereka bekerja sama dan tolong menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerja sama dan semakin tenang jiwa, maka semakin banyak pula yang dapat diraih dari alam raya ini. Sebaliknya mempersekukan Allah menjadikan perhatian tertuju pada sumber yang berbeda-beda, dan menyebabkan tidak dapat berkonsentrasi dalam usaha. Di sisi lain, kedurhakaan mengakibatkan kekacauan dan permusuhan, sehingga tenaga dan pikiran tidak lagi tertuju kepada upaya meraih kesejahteraan, tetapi mengarah kepada upaya membentengi diri dari ancaman sesama (Shihab, 2006: 183).

Dorongan lain yang timbul dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat bertambahnya pangsa pasar. Pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambah besarnya pangsa pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan yang bertambah pula. Karena peranan inilah pertumbuhan penduduk akan menimbulkan dorongan bertambahnya produksi nasional dan tingkat ekonomi (Sukirno, 2004: 430).

2.2.3.2. Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD

Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa

pemerintah membutuhkan dana untuk membiyai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat ketersediaan untuk membayar pajak (Mangkoesoebroto, 1993: 173). Di samping hal itu, menurut hipotesis Kremer, jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat (Mankiw, 2006: 207).

Ibnu Khaldun juga telah menjelaskan tentang teori hubungan penduduk terhadap pajak. Khaldun menyatakan ketika ada lebih banyak total permintaan karena ada peningkatan populasi, maka akan ada lebih banyak produksi, laba, dan pajak (Chamid, 2010: 254).

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dari Susanto (2014), Santosa dan Rahayu (2005), Triani dan Kuntari (2010) mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

2.2.4 Dana Alokasi Umum

2.2.4.1. Konsep Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasar UU No. 33 tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU yang dianggarkan untuk pemerintah daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan untuk masing-masing daerah, DAU dialokasikan berdasar dari celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal yang dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah. Sedangkan yang dimaksud alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kholil (1992) menyatakan pada zaman pemerintahan *Khalifah* Umar bin Abdul Aziz, *Khalifah* Umar bin Abdul Aziz telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Beliau menyatakan bahwa setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak wilayah masing-masing dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing dari wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terjadi surplus, *Khalifah* Umar menyarankan agar daerah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil *shadaqah* yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil *shadaqah* secara merata ke seluruh wilayah Islam (Chamid, 2010: 115-116)

Dana Alokasi Umum termasuk dalam pengeluaran jika dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, dan sebagai penerimaan jika dilihat dari sudut

pandang pemerintah daerah. DAU dalam hal ini merupakan dana amanah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Anfâl ayat 27 (Shihab, 2006: 5.422):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵

Menurut Quraish Shihab Ayat tersebut mengingatkan orang beriman agar tidak mngurangi sedikitpun hak Allah sehingga mengkufuri-Nya dan juga menghianati Rasulullah Muhammad saw, tetapi perkenankanlah seruannya (dan janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu) oleh siapapun, sedang kamu mmengetahui. Amanat kepada manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi termasuk juga rahasia yang dibisikka (Shihab, 2006: 5.423). Dalam hal ini DAU harus digunakan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk membiayai pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.2. Hubungan DAU dengan PAD

Hayek menyatakan bahwa dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah akan

⁵ Yang artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat, di mana keadaan inilah yang akan mendorong terjadinya *allocative efficiency* (Khusaini, 2006: 91).

Penelitian dari Frelistiyani dan Rohman mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa DAU mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan juga DAU dan belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD.

2.2.5. Pengeluaran Pemerintah

2.2.5.1. Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesosebroto, 1993: 169).

Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan peasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya (Mangkoesosebroto, 1993: 170).

Kegiatan yang menambah pengeluaran pemerintah mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab agama lain, Kitab Suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah tentang pengeluaran pemerintah. Dalam alqur'an Allah beriman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 219 (Mannan, 1993: 232):

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.⁶

Menurut Mannan, dalam Al Qur'an terjembut dijelaskan: Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Ini bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam tidak hanya mencegah pemborosan, tapi juga mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk, karena dengan demikian kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaanya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Di samping ini, membagi-bagi harta benda dalam hukum waris Islam dan pelaksanaan zakat merupakan prinsip pokok yang merasionalisasi sistem perokonomian Islam. Sesungguhnya seluruh

⁶ Yang artinya : “mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; yang lebih dari keperluan”.

filsafat ekonomi tentang kegiatan pengeluaran pemerintah adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran dan untuk menjamin distribusi kekayaan yang berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan orang miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta benda pribadi. Tentu saja sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan untuk si miskin (Mannan, 1993: 232).

2.2.5.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD

Pigou berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan barang publik sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidak puasan marginal (*marginal disutility*) akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik (Mangkoesoebroto, 1993: 64).

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004: 168). Dengan meningkatnya

kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Umdatul Husna pada tahun 2015 mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD

2.3. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini penulis bangun berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan pada Bab 3 sub-bab 2 tentang Landasan Teori. Diharapkan pembuatan hipotesis yang berdasar teori dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu mampu menjadikan hipotesis yang penulis ajukan sebagai hipotesis yang baik.

2.3.1. Hipotesis 1

Menurut Ibnu Khaldun (2011: 493) ketika beban yang dikenakan pada pendapatan dan gaji atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.

Peacock dan Wiseman juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesebroto, 1993: 173). Teori tersebut menjelaskan hubungan tentang pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan daerah melalui pajak juga akan meningkat walaupun tarif dari pajak tidak berubah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemungutan pajak yang terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang mampu membayar pajak.

Teori yang ada sejalan dengan hasil penelitian dari Heruyanto (2016), Susanto (2014), Santosa dan Rahayu (2005), Sari (2013), Jaya dan Widanta (2014) yang menemukan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, maka penulis mengajukan hipotesis:

H_{01} = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);

H_{a1} = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.2. Hipotesis 2

Berdasar dari teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat ketersediaan untuk membayar pajak (Mangkoesebroto, 1993: 173).

Teori lain yang mendukung teori Peacock dan wiseman adalah teori Kremer yang menyatakan bahwa jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat maka daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat (Mankiw, 2006: 207).

Teori Peacock dan wiseman juga didukung oleh teori Khaldun yang menyatakan bahwa ketika ada lebih banyak total permintaan karena ada peningkatan populasi, maka akan ada lebih banyak produksi, laba, dan pajak (Chamid, 2010: 254).

Teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian dari Susanto (2014), Santosa dan Rahayu (2005), Triani dan Kuntari (2010) mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menemukan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, maka penulis mengajukan hipotesis:

H_{02} = Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;

H_{a2} = Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.3. Hipotesis 3

Berdasarkan teori Hayek yang menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui tentang kondisi daerahnya dibanding pemerintah pusat, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih baik jika dilakukan

oleh pemerintah daerah yang mana akan menciptakan *allocative efficiency* (Khusaini, 2006: 91).

Teori Hayek tersebut didukung oleh teori dari Khaldun mengenai pemerintah daerah menyatakan bahwa satu-satunya alasan bagi percepatan pembangunan di kota adalah bahwa pemerintah dekat dengan mereka dan menginvestasikan uangnya di sana, persis seperti air sungai yang menjadikan sekelilingnya hijau, membuat irigasi tanah yang berdekatan dengannya, sementara dari kejauhan sungai tersebut segalanya tetap kering (Khaldun, 1967: 369).

Teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian dari Frelistiyani dan Rohman mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mendapatkan hasil bahwa DAU mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan juga DAU serta belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasar beberapa argumen tersebut maka penulis mengajukan hipotesis:

H_{03} = Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);

H_{a3} = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.4. Hipotesis 4

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu

membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004: 168).

Khaldun (1967: 237) juga menyatakan bahwa suatu penahanan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan, pemerintah berfungsi sebagai pasar terbesar bagi dunia dan substansi dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan negara, atau hilang, dan tidak menggunakan hasil penerimaan ini secara tidak tepat, maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga akan dana yang diberikan kepada para pegawai dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena itu, total belanja mereka menjadi merosot. Mereka merupakan bagian penting dari penduduk dan belanjanya merupakan bagian penting dalam perdagangan. Jadi (ketika mereka berhenti belanja), kemerosotan bisnis dan keuntungan komersial mengalami penurunan dikarenakan kurangnya modal. Dunia usaha menjadi terganggu sehingga keuntungan usaha juga akan merosot, hal ini akan berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

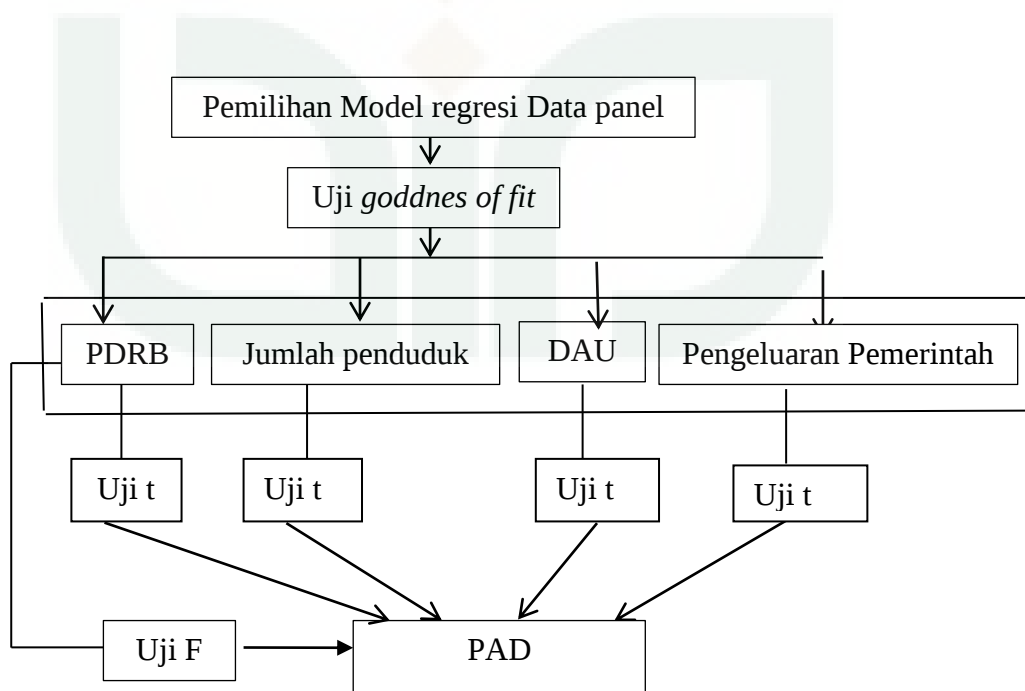
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umdatul Husna pada tahun 2015 mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasar beberapa argumen tersebut maka penulis mengajukan hipotesis:

H_{04} = Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);

H_{a4} = Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdapat empat variabel independen (PDRB, jumlah penduduk, DAU dan pengeluaran pemerintah) dan satu variabel dependen (PAD). Untuk memudahkan alur pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasar jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen, yakni jenis penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkontrol (laboratorium) dengan menggunakan data yang tersedia yang kemudian diolah agar menjadi suatu informasi berharga (Sugiyono, 2013: 11). Berdasar metode analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian dengan metode analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah regresi yang berdasar data *time series* dan *cross section*. Alat bantu analisis yang akan penulis gunakan adalah dengan aplikasi E-Views seri 8.

3.2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data tersebut didapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS). Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data yang disediakan oleh BPS dalam bentuk pustaka digital yang diunduh dari situs bps.go.id serta dari pustaka cetak dengan langsung mendatangi kantor BPS Provinsi Yogyakarta. Data yang penulis gunakan ialah data panel, di mana menggunakan *time series* dari kurun waktu tahun 2010-2014 dan *cross section* dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 119).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 119).

Teknik pemilihan sampel yaitu dengan *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel ini didasarkan dari mulai berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga data yang penulis gunakan adalah mulai dari tahun 2010 dengan batasan sampel hingga tahun 2014 di mana pada tahun tersebut merupakan data terakhir yang dipublikasikan oleh pihak BPS.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Sedangkan variabel independennya terdiri dari Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, jumlah penduduk, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.4.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan rutin yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang diatur dalam undang-undang (UU No. 32 Tahun 2004). Jika diformulakan dalam model, maka:

$$PAD = P + R + K + O$$

di mana PAD merupakan pendapatan Asli Daerah; P adalah pajak daerah; R adalah retribusi daerah; K adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dsipisahkan; dan O adalah PAD lainnya yang sah.

3.4.2. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. Dasar perhitungan PDRB terbagi menjadi dua yakni berdasar harga berlaku dan berdasar harga konstan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan PDRB atas harga berlaku dikarenakan PDRB atas harga berlaku lebih mampu untuk menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan PDRB atas harga berlaku, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dalam data yang penulis gunakan ini, data PDRB

yang diolah oleh BPS berdasarkan pendekatan produksi. PDRB berdasar pendekatan produksi yaitu jumlah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi.¹

3.4.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan jumlah keseluruhan orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu wilayah di Negara Indonesia pada periode tertentu (UU No. 24 Tahun 2013). Data jumlah penduduk tidak semuanya berdasarkan survei. Survei jumlah penduduk dilakukan dalam 10 tahun sekali yakni pada tahun 2010. Sehingga data jumlah penduduk yang penulis gunakan pada rentang waktu 2010-2014 merupakan data proyeksi.

3.4.4. Dana Alokasi Umum

Berdasar UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU berdasarkan UU tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan:

$$DAU = AD + CF$$

¹.[http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_\(PDRB\)_rev160615.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_(PDRB)_rev160615.pdf) diakses tanggal 30 juli 2016 jam 10.03 WIB

di mana DAU adalah Dana Alokasi Umum; AD adalah alokasi dasar; dan CF adalah celah fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sedangkan celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3.4.5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, (Mangkoesoebroto, 1993: 169)

3.5. Model Penelitian

Pembentukan model merupakan formulasi dari teori ekonomi yang ada. Permodelan terbagi menjadi dua, yakni pembentukan model ekonomi dan model regresi. Berdasarkan teori yang penulis sampaikan pada BAB II, maka model ekonomi dari fungsi PAD dapat ditulis:

$$PAD = f(PDRB, P, DAU, PP)$$

Fungsi ekonomi tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), jumlah penduduk (P), Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran pemerintah (PP). Sedangkan model regresinya dalam bentuk log linier, penulis susun dalam bentuk:

$$\ln PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln P_{it} + \beta_3 \ln DAU_{it} + \beta_4 \ln PP_{it} + e_{it}$$

di mana: PAD = Pendapatan Asli Daerah; PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; P = jumlah penduduk; DAU = Dana Alokasi Umum; PP = Pengeluaran Pemerintah; e = faktor gangguan lain; i = kabupaten/kota; dan t = waktu.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model regresi data panel. Model regresi data panel ialah model regresi yang berbasis data panel (Gujarati & Porter, 2009: 591). Terdapat tiga metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, serta *random effect model* (Widarjono, 2009: 231).

3.6.1. Common Effect Model

Common effect model merupakan analisis data panel yang paling sederhana, hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009: 231). Model ini memiliki kelemahan dalam ketidakmampuan model untuk membedakan varian yang unik dalam suatu silang tempat atau sejumlah silang tempat (Kuncoro, 2004:113).

3.6.2. Fixed effects Least Square Dummy Variable (LSDV) Model

Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda pada setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Untuk menangkap perbedaan *intercept* antar subjek maka digunakan variabel *dummy* (Widarjono, 2009: 232).

Model estimasi dengan menggunakan variabel *dummy* sebagai pembeda antar *intercept* disebut teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

3.6.3. *Random effect Model/ Error Components Model*

Model ini menggunakan kesalahan random dalam waktu, ruang, serta kesalahan random yang tidak unik terhadap waktu dan ruang namun masih *random* terhadap model regresi dalam menurunkan estimasi yang efisien dan tidak bias. Komponen dari total kesalahan dalam model ini meliputi kesalahan sistematis terhadap ruang, waktu serta keduanya. Keunggulan dari model ini adalah tidak perlunya asumsi mengenai di mana varian harus ditetapkan. Namun model ini juga memiliki kelemahan di mana model ini diatur oleh suatu kesalahan *random*, sehingga kesalahan harus dimodelkan secara akurat (Kuncoro, 2004: 113)

Pemilihan model dari teknik estimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada tiga uji yang dapat digunakan untuk memilih teknik estimasi regresi data panel, pertama uji F, kedua uji Lagrange Multiplier, dan ketiga uji Hausman (Widarjono, 2009: 238).

a) Uji F

Uji F digunakan untuk melihat model mana yang lebih baik, antara *common effect* atau *fixed effect*. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan

menggunakan *F Restricted*, yaitu dengan cara melihat besarnya nilai *Prob. F* pada hasil estimasi model *fixed effect*. Dalam pengujian ini penulis mengajukan hipotesis:

H_{01} = model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*;

H_{a1} = model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*.

Hasil dari uji tersebut yaitu, jika nilai *Prob. F* lebih besar dari 5% maka H_0 diterima. Namun jika nilai *Prob. F* lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak yang berarti hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima. Atau dapat juga dilakukan dengan melihat nilai *F* hitung. Jika nilai *F* hitung lebih besar daripada *F* tabel, maka H_0 ditolak. (Suwardi, 2012: 5). Jika H_0 diterima, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *common effect* daripada model *fixed effect*. Namun bila H_0 ditolak, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *fixed effect* daripada model *common effect*.

b) Uji *Laurange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menguji model terbaik antara model *random effect model* atau *common effect*. Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan. Adapun nilai statistik uji LM dapat dihitung berdasarkan formula (Widarjono, 2009: 239).

$$LM = \frac{nT}{2T - 1} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T \cdot \mu_i)}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \mu_{it}} = 1 \right]$$

di mana n adalah jumlah individu; T adalah jumlah periode waktu dan μ adalah residual metode OLS. Dalam uji *Lagrange Multiplier* ini penulis mengajukan hipotesis:

H_{02} = model *common effect* lebih baik daripada *random effect model*;

H_{a2} = model *random effect model* lebih baik daripada *common effect*.

Hasil dari uji LM tersebut yaitu, jika nilai *chi-square statistic* hitung lebih besar dari nilai kritis *chi-squares statistic* tabel maka H_0 ditolak. Namun bila nilai *chi-square statistic* hitung lebih kecil dari nilai kritis *chi-squares statistic* tabel maka H_0 tidak diterima. Atau dapat juga dilihat dari nilai *Prob. chi-square statistic*. Jika nilai *Prob. chi-square statistic* lebih kecil dari alfa 0,05 maka H_0 ditolak (Suwardi, 2012: 7). Jika H_0 diterima, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *common effect* daripada model *random effect*. Namun bila H_0 ditolak, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *random effect* daripada model *common effect*.

c) Uji Hausman

Untuk mengetahui model yang terbaik antara *fixed effect* atau *random effect model* maka menggunakan *Hausman test*. Uji ini dikembangkan oleh Hausman. Dengan menggunakan alat bantu program E-views, uji Hausman dapat dilihat pada nilai *probabilitas Chi-square statistic*. Dalam uji ini penulis mengajukan hipotesis:

H_{03} = model *fixed effect* lebih baik daripada *random effect model*;

H_{a3} = model *random effect model* lebih baik daripada *fixed effect*.

Hasil dari uji ini yaitu, bila nilai *probabilitas chi-squares* lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima. Namun bila nilai *probabilitas chi-square* lebih kecil daripada 5% maka H_0 ditolak yang berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima (Suwardi, 2011: 3). Jika H_0 diterima, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *fixed effect* daripada model *random effect*. Namun bila H_0 ditolak, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *random effect* daripada model *fixed effect*.

3.7. Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*)

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur melalui nilai *goodness of fit*-nya (Kuncoro, 2004: 81). Uji kelayakan ini digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi hipotesis yang dibangun. Atau secara umum, uji signifikansi merupakan prosedur, di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol (H_0) (Gujarati & Porter, 2009: 115). Uji kelayakan ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasinya.

3.7.1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk melakukan uji statistik terhadap seluruh variabel independen, sehingga dapat terlihat apakah seluruh variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

(Kuncoro, 2004: 82). Dalam melakukan uji F ini, penulis mengajukan hipotesis:

H_0 = Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen;

H_a = Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk melakukan uji F dapat dilakukan dengan cara melihat nilai dari *Prob. chi-square*, bila nilai dari *Prob. chi-square* lebih besar dari alfa 0,05, maka H_0 diterima, namun bila nilai *Prob. chi-square* lebih kecil dari alfa 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima. Atau dapat dilakukan dengan melihat nilai *chi-square statistic*. Jika nilai *chi-square statistic* lebih besar daripada nilai *chi-square* tabel, maka H_0 ditolak (Suwardi, 2012: 8). Bila H_0 diterima, maka berarti seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun bila H_0 ditolak, maka berarti seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi berkisar di antara nol hingga satu. Nilai dari koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R-square overall*. Semakin kecil nilai *R-square* (mendekati angka 0) berarti kemampuan model untuk menerangkan kemampuan variabel

independen dalam memengaruhi variabel dependen sangat terbatas. Namun bila nilai *R-square* mendekati angka satu, berarti variabel independen mampu memberikan informasi yang cukup banyak untuk menjelaskan variabel dependen (Kuncoro, 2004: 840).

3.7.3. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2004: 82). Dalam melakukan uji t ini penulis mengajukan hipotesis:

H_0 = Variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen;

H_a = Variabel independen berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.

Keputusan untuk tidak menolak atau tidak menerima hipotesis nol (H_0) adalah berdasarkan nilai dari uji statistik t yang dilakukan. Untuk melakukan uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat nilai dari *Prob. t*. Bila nilai dari *Prob. t* lebih besar daripada alfa 0,05 maka H_0 diterima, namun jika *Prob. t* lebih kecil daripada alfa 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a) (Suwardi, 2012: 8). Bila H_0 diterima, maka berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Namun bila H_0 ditolak, maka berarti variabel independen berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sebelum melakukan analisis regresi data panel, penulis perlu menunjukkan karakteristik distribusi dari masing-masing data yang penulis gunakan. Dalam pemaparan karakteristik dari masing-masing data, penulis menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ataupun karakteristik dari suatu data (Jogiyanto, 2004: 163).

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2004: 169).

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2013: 19). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah. Berikut statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

	PAD	PDRB	JP	DAU	PP
Mean	20.700.396	3.624.231	178.360	356.000.000	562.000.000
Median	17.221.007	2.573.990	153.550	351.000.000	543.000.000
Maximum	81.754.841	14.402.880	342.900	603.000.000	991.000.000
Minimum	3.137.026	1.342.270	98.700	33.069.379	296.000.000
Std. Dev.	16.618.928	2.932.091	75.225	106.000.000	156.000.000

Sumber : Telah diolah kembali pada lampiran 3.1

Tabel 4.1 di atas merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Satuan dalam variabel ini adalah dalam ribu Rupiah. Berdasarkan tabel 4.1 variabel pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 17.221.007 dengan nilai standar deviasi 16.618.928. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data untuk variabel ini baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Nilai tertinggi adalah 81.754.841 dan nilai terendahnya adalah 3.137.026.

Variabel yang kedua adalah produk domestik regional bruto (PDRB), satuan dalam variabel ini adalah dalam juta Rupiah, nilai rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 3.624.231 dengan nilai standar deviasi 2.932.091. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data untuk variabel ini baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Nilai tertinggi adalah 14.402.880 dan nilai terendahnya adalah 1.342.270.

Variabel yang ketiga adalah jumlah penduduk (JP), nilai rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 178.360 dengan nilai standar deviasi 75.225. Hal

ini menunjukkan bahwa kualitas data untuk variabel ini baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Nilai tertinggi adalah 342.900 dan nilai terendahnya adalah 98.700.

Variabel yang keempat adalah dana alokasi umum (DAU), satuan dalam variabel ini adalah dalam ribu Rupiah, nilai rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 356.000.000 dengan nilai standar deviasi 106.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data untuk variabel ini baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Nilai tertinggi adalah 603.000.000 dan nilai terendahnya adalah 33.069.379.

Variabel yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah (PP), satuan dalam variabel ini adalah dalam ribu Rupiah, nilai rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 562.000.000 dengan nilai standar deviasi 156.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data untuk variabel ini baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Nilai tertinggi adalah 991.000.000 dan nilai terendahnya adalah 296.000.000.

4.1.2 Pemilihan Regresi Data Panel

Seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB III, dalam model regresi data panel terdapat tiga model yang sering digunakan, yakni *common effect*, *fixed effect* dan *random effect model*. Dalam menentukan model terbaik yang akan digunakan maka akan dilakukan beberapa uji, di antaranya Chow test untuk memilih model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*, uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih model terbaik antara *common effect* dengan *random effect model* dan uji Hausman untuk memilih model terbaik

dari *fixed effect* dengan *random effect model*. Pada setiap pengujian dalam pemilihan model, penulis akan menggunakan derajat kesalahan (alfa) pada nilai 0,05 (5%).

4.1.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melihat model mana yang lebih baik, antara *common effect* atau *fixed effect*. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan *F Restricted*, yaitu dengan cara melihat nilai *Prob. F* pada hasil estimasi *fixed effect*. Jika nilai *Prob. F* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, namun jika *Prob. F* memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima (Suwardi, 2011: 3).

Metode digunakan untuk membandingkan apakah model yang digunakan bersifat *fixed effect* atau *commont effect*. Menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common effect}$$

$$H_1 = \text{Fixed effect model}$$

Berdasarkan hasil estimasi *Common effect* dan metode *Fixed* diperoleh F-statistik sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.138114	(9,36)	0.0002

Sumber: Lampiran 3.5

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. *Cross-section F* sebesar 0,0002 yang nilainya $< \alpha$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*

4.1.2.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model yang tepat apakah model itu *fixed effect* atau *random effect*. Uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = Model Random Effect

H_1 = Model Fixed Effect

Berdasarkan hasil estimasi *Model Random Effect* dan metode *Fixed Effect* diperoleh *F-statistik* sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.537785	4	0.0138

Sumber: Lampiran 3.6

Pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji hausman dengan nilai *Chi-Square* sebesar 12.537785 dengan *p-value* 0,0138 dan df sebesar 4 pada α 5%. Maka hasil ini menerima hipotesis nol yang berarti bahwa model *fixed effect* lebih baik dari model *random effect*

Berdasarkan beberapa proses pemilihan manakah yang lebih baik antara tiga model pendekatan estimasi data panel yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* diperoleh hasil bahwa model estimasi *fixed effect* adalah

lebih baik untuk digunakan dalam model estimasi data panel dalam penelitian ini

4.1.2.3 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Berdasarkan *uji chow* dan *uji hausman*, telah memberikan hasil bahwa model *fixed effect* adalah model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Estimasi model *fixed effect* ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen dan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Output hasil estimasi *fixed effect* menggunakan regresi data panel ini akan menjadi bahan untuk menarik kesimpulan dari hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Berikut tabel hasil regresi dengan model estimasi *fixed effect* menggunakan program aplikasi *Eviews 8*

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	11.91544	2.645434	4.504151	0.0001
JP	-1001.995	431.1980	-2.323746	0.0259
DAU	-0.008523	0.013042	-0.653470	0.5176
PP	0.052442	0.009757	5.375009	0.0000
C	1.297887	66253675	1.958966	0.0579
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.958967	Mean dependent var		28682952
Adjusted R-squared	0.944149	S.D. dependent var		21122833
S.E. of regression	4915371.	Sum squared resid		8.697914
F-statistic	64.71795	Durbin-Watson stat		1.779265
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Lampiran 3.3

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.4 menggunakan program *E-views 8* di atas, dapat diperoleh persamaan regresi untuk data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PAD = 1.297887 - 11.91544PDRB - 1001.995JP - 0.008523DAU + 0.052442PP + \mu$$

Di mana PAD = Pendapatan Asli Daerah; PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; JP = jumlah penduduk; DAU = Dana Alokasi Umum; PP = Pengeluaran Pemerintah; dan μ adalah *error* secara menyeluruh dan individual

4.1.3 Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*)

4.1.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable-variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variable dependen (Algifari, 2013). Hasil olahan untuk mengetahui uji F ini dapat dilihat pada bagian *Weighted Statistics* dalam tabel hasil uji regresi menggunakan estimasi model *fixed effect* pada tabel diatas

Hasil pengolahan data menggunakan program *Eviews 8* pada bagian *weighted statistic* (tabel 4.4), diperoleh nilai *Prob (F-Statistic)* menunjukkan angka sebesar 0,000000 lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel independen Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (JP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengeluaran Pemerintah (PP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

4.1.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi berkisar di antara 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil atau mendekati angka nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi besar atau mendekati angka satu, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup luas dan hampir memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2004: 84). Untuk menentukan nilai koefisien determinasi, dapat dilihat dari nilai *R-square overall*. Nilai *R-square overall* sebesar 0.958967 yang berarti mendekati nilai satu. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah dapat menjelaskan variasi variabel dependen Pendapatan Asli Daerah sebesar 95,89%, sedangkan sisanya 4,11%, variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang diluar penelitian ini

4.1.3.3 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menentukan uji signifikansi individual dapat dilihat dari nilai

Prob. z. Jika nilai *Prob z*. lebih besar dari alfa 5% maka H_0 diterima, namun bila nilai dari *Prob. z* lebih kecil dari alfa 5% maka H_0 ditolak dengan begitu menerima hipotesis alternatif (H_a). Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect model* pada tabel 4.3 diatas, maka

- a. Nilai koefisien Produk Domestik Regional Bruto sebesar 11.91544 dengan nilai *Prob. z* 0.001, nilai ini di bawah alfa 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak, dengan demikian menerima H_1 , yang berarti bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat dibaca bahwa, dari setiap kenaikan 1.000.000 rupiah Produk Domestik Regional Bruto, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 11.9 rupiah
- b. Nilai koefisien dari jumlah penduduk sebesar -1001.995 dengan nilai *Pro. z* 0.0259, nilai ini di bawah alfa 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan ke arah negatif. Sehingga dapat dibaca bahwa, setiap kenaikan 1 orang penduduk, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.0259 rupiah.
- c. Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum sebesar 0.008523 dengan nilai *Prob. z* 0.5176, nilai ini di atas alfa 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima, dengan demikian menolak H_3 , yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- d. Nilai koefisien dari Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.052442 dengan nilai *Prob. z* 0,000, nilai ini di bawah alfa 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak, dengan demikian menerima H_4 , yang berarti bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat dibaca bahwa, setiap kenaikan 1.000 rupiah Pengeluaran Pemerintah, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0.052442 rupiah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Hipotesis 1

Peacock dan Wiseman menyatakan, pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar (Mangkoesoebroto, 1993: 173). Teori tersebut menjelaskan hubungan tentang pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan daerah melalui pajak juga akan meningkat walaupun tarif dari pajak tidak berubah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemungutan pajak yang terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang mampu membayar pajak.

PDRB merupakan tolak ukur suatu perekonomian, yang menjadi gambaran mengenai kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu waktu. Ketika jumlah barang dan jasa yang diproduksi meningkat maka nilai PDRB

juga meningkat. Peningkatan PDRB dijadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat berarti kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban kepada pemerintahnya juga akan meningkat sehingga memperbesar Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak harus dengan meningkatkan beban pajak yang dikenakan kepada setiap masyarakat, karena hal ini nantinya dapat menghambat pembangunan ekonomi. Meningkatnya nilai kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat hanya akan membuat masyarakat malas untuk bekerja, sehingga perekonomian akan menjadi lesu

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam terdapat kesamaan dengan pertumbuhan ekonomi konvensional dalam memperhatikan sisi material; bertambahnya pendapatan bagi masyarakat, tetapi dalam Islam tidak dibenarkan jika pertumbuhan ekonomi berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan prinsip Islam, karena itu di antara doa Umar bin Khatab, “Ya Allah, janganlah perbanyak kepadaku dari dunia yang menyebabkanku melampaui batas, dan Janganlah Engkau persedikit kepadaku darinya yang menyebabkan aku lupa; karena sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan.” Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bertambahnya pendapatan merupakan sebuah tuntutan, namun bukan satu-satunya tolak ukur bagi pertumbuhan ekonomi di dalam Islam (Jaribah, 2003: 399).

Berdasarkan hasil dari hipotesis pertama mengenai pengaruh PDRB terhadap PAD yaitu nilai koefisien PDRB sebesar 11.91544 dengan nilai

Prob. Z 0.0001 nilai ini di bawah alfa 0.05, yang berarti bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah hubungan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dari setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Heruyanto (2016), Susanto (2014), Santosa dan Rahayu (2005), Sari (2013), Jaya dan Widanta (2014) mengenai pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

4.2.2 Hipotesis 2

Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat ketersediaan untuk membayar pajak (Mangkoesoebroto, 1993: 173). Ibnu Khaldun juga telah menjelaskan tentang teori hubungan penduduk terhadap pajak. Khaldun menyatakan ketika ada lebih banyak total permintaan karena ada peningkatan populasi, maka akan ada lebih banyak produksi, laba, dan pajak (Chamid, 2010: 254).

Berdasarkan hasil dari hipotesis kedua mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni nilai koefisien dari jumlah

penduduk sebesar -1001.995 dengan nilai *Prob. z* 0.0259, nilai ini di bawah alfa 0.05, yang berarti bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan yang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan dari jumlah penduduk, maka PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan mengalami penurunan.

Hal ini bertentangan dari hipotesis yang penulis bangun bahwasanya penulis melakukan dugaan sementara bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif. Maka dari itu, penulis perlu melakukan analisa yang lebih dalam mengenai keadaan penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Kemampuan penduduk dalam melakukan belanja kesehariannya bergantung dari pendapatan yang mereka terima. Mereka yang memiliki pendapatan yang mencukupi akan masuk pada golongan penduduk menengah dan kaya, namun bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka, maka akan masuk kedalam golongan penduduk miskin. Berikut gambaran mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Tabel 4.5 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu

Tahun	Tingkat kemiskinan
2010	16.37 %
2011	17.36 %
2012	17.51 %
2013	17.75 %
2014	17.09 %

Sumber: Bengkulu.bps.go.id

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, bahwasanya tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Bengkulu fluktuatif dan tergolong masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat sejak tahun 2010 hingga 2014, tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2010, dan tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2013. Karena tingginya tingkat kemiskinan itulah yang menyebabkan belum maksimalnya masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dari Jaya dan Widanta (2014) dan Heruyanto (2016) yang mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan negatif.

4.2.3 Hipotesis 3

Hayek menyatakan bahwa dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat, di mana keadaan inilah yang akan mendorong terjadinya *allocative efficiency* (Khusaini, 2006: 91).

Hasil penelitian dari hipotesis ketiga mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien dari DAU sebesar -0.008523 dengan nilai *Prob. z* 0.5176, nilai ini di atas alfa 0.05, maka dapat diambil dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini disebabkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri belum memberikan hasil yang baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hal ini sesuai dengan White Paper (2011) yang ditulis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berpendapat bahwa permasalahan utama kurang tercapainya dampak DAU seperti yang diharapkan bukan terletak pada kecilnya jumlah DAU, tetapi lebih pada kurang efisiennya pengalokasian DAU serta kurang efektifnya tatakelola implementasi DAU. Hal ini terjadi karena pendekatan pencapaian yang berlaku di Indonesia adalah pendekatan berbasis input, dimana DAU hanya dapat dibelanjakan untuk jenis input tertentu seperti fasilitas kelas, buku, dan lain-lain. Disamping itu daerah tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk berkreasi sesuai kebutuhan mereka karena kuatnya pendekatan top-down dalam perencanaan, serta berbagai permasalahan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DAU.

Tidak signifikannya DAU terhadap PAD bisa juga disebabkan banyak pejabat daerah di Provinsi Bengkulu yang tidak amanah dalam mengelola DAU. Sebagaimana banyak diberitakan tentang kasus korupsi yang melibatkan banyaknya pejabat daerah. Selama enam bulan saja (Januari-Juni) 2016, jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu berhasil menangani sebanyak 40 perkara korupsi. Kasus korupsi tersebut terjadi di sejumlah instansi pemerintah di kabupaten dan kota di Bengkulu. Dari 40 kasus korupsi yang diungkap Kejati Bengkulu tersebut, sebanyak 33 perkara di antaranya

sudah sampai pada tingkat penyidikan dan 17 perkara lagi masih dalam tahap penyelidikan.¹

4.2.4 Hipotesis 4

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004: 168). Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Hasil dari penelitian hipotesis keempat mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai koefisien dari Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.052442 dengan nilai *Prob. z* 0.000, nilai ini di bawah alfa 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak, dengan demikian menerima H_4 , yang berarti bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan

¹ <http://www.beritasatu.com/nasional/376222-selama-enam-bulan-kejati-bengkulu-tangani-40-kasus-korupsi.html> diakses pada tanggal 3 Maret 2017 Jam 10:51 WIB

Asli Daerah. Sehingga dapat dibaca bahwa, setiap kenaikan 1.000 rupiah Pengeluaran Pemerintah, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0.052442 rupiah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Khaldun (1967: 237) juga menyatakan bahwa suatu penahanan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan, pemerintah berfungsi sebagai pasar terbesar bagi dunia dan substansi dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan negara, atau hilang, dan tidak menggunakan hasil penerimaan ini secara tidak tepat, maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga akan dana yang diberikan kepada para pegawai dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena itu, total belanja mereka menjadi merosot. Mereka merupakan bagian penting dari penduduk dan belanjanya merupakan bagian penting dalam perdagangan. Jadi (ketika mereka berhenti belanja), kemerosotan bisnis dan keuntungan komersial mengalami penurunan dikarenakan kurangnya modal. Dunia usaha menjadi terganggu sehingga keuntungan usaha juga akan merosot, hal ini akan berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak

Penelitian ini juga didukung oleh hukum Wagner, yang mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dari hukum wagner tersebut dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang saling tarik-menarik antara pendapatan per kapita masyarakat dengan pengeluaran

pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong peningkatan penerimaan. Dapat dijelaskan bahwa bahwa peningkatan penerimaan daerah akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah (Mangkoesoebroto, 1995: 171).

Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Umdatul Husna pada tahun 2015 mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD.